JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
e-ISSN: 2777-015X., DOI: https://doi.org/10.52046/jssh.v6i2.252-264
Web: https://journal.tyarlyta.com/index.php/jssh
E-mail: jurnaljssh.ummu@gmail.com
Support By :

Collaborative Governance in Coastal Poverty Alleviation (*A Case Study in Ngemplakrejo Urban Village, Pasuruan City*)

(Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Pesisir: Studi Kasus di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan)

Nofita Ningsih[1]✉ dan Agus Prianto[1]

[1] *Program Studi Admistrasi Publik, Fakultas ilmu Sosial dan Politik, Indonesia.*

✉ Email: nftningsih@gmail.com

Info Artikel : ☑ Artikel Penelitian ☐ Artikel Pengabdian ☐ Riview Artikel
Diterima : 8 Sept. 2026, Disetujui : 26 Okt. 2026, Publikasi On-Line : 5 Nov. 2026

Abstract

Poverty alleviation in coastal areas requires collaboration between government institutions and community actors, yet little attention has been paid to how collaborative governance operates in practice, particularly regarding resource inequalities, participatory arrangements, and dependence on local leadership. This study analyzes the implementation of collaborative governance in poverty alleviation in Ngemplakrejo Village, Pasuruan City, and identifies its supporting and inhibiting factors. Using a descriptive qualitative case study conducted in July–August [year to be confirmed], data were gathered through in-depth interviews with four purposively selected male informants from the village government, the municipal social service, a coastal community association, and the fishing community, together with field observations and document analysis (including the 2025 village monograph and the 2024 Prodeskel). Data were analyzed using Miles, Huberman, and Saldaña's interactive model and validated through source and method triangulation. Based on Ansell and Gash's (2008) framework, the findings show that collaboration is facilitated by shared commitment, communication, regulatory support, and the village head's coordinating role. However, resource inequalities, budget constraints, weakly institutionalized participation, and dependence on individual leadership limit its inclusiveness and continuity. The study concludes that collaborative governance in Ngemplakrejo is operational but institutionally fragile, as coordination has been established without addressing inequalities in participation and resources. Strengthening formal participation mechanisms, clarifying actors' responsibilities, and institutionalizing facilitative leadership are necessary for more inclusive and sustainable poverty alleviation in coastal communities.

🕮 ***Keyword:*** ***Collaborative Governance; Coastal Communities; Poverty Allevation; Inter-Actor Collaboration; Ngemplakrejo Village.***

I. PENDAHULUAN

Menurut 2020 Global Multidimensional Poverty Index (MPI) kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan ekonomi secara terpisah, tetapi membutuhkan keterpaduan kebijakan dan koordinasi antarpelaksana. Di Indonesia, kebutuhan tersebut tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan

Kemiskinan serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antaraktor menjadi aspek penting dalam memahami pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam konteks masyarakat pesisir yang menghadapi kerentanan penghidupan akibat ketergantungan pada sumber daya laut, ketidakpastian hasil tangkapan, dan keterbatasan alternatif mata pencaharian. Di Kota Pasuruan, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Maret 2024 persentase penduduk miskin mencapai 6,32%, atau sekitar 13.070 jiwa (Profil Kemiskinan Kota Pasuruan 2024). Pada tingkat lokal, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, merupakan kawasan pesisir yang memiliki aktivitas perikanan laut penting bagi perekonomian kota. Namun, besarnya potensi perikanan perlu dilihat bersama dengan persoalan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya. Data mengenai jumlah penduduk miskin, proporsi nelayan, kontribusi produksi ikan, dan pemanfaatan fasilitas perikanan di Ngemplakrejo perlu ditempatkan berdasarkan sumber serta tahun pengukurannya masing-masing. Konteks tersebut menjadikan Ngemplakrejo relevan untuk mengkaji bagaimana koordinasi antarpelaku pemerintahan dan masyarakat berlangsung dalam upaya pengentasan kemiskinan pesisir.

Dalam administrasi publik, *collaborative governance* menawarkan perspektif untuk memahami keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan secara Bersama(Ansell & Gash, 2008), berdasarkan telaah terhadap 137 kasus kolaborasi, mengembangkan model yang menjelaskan bagaimana kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif memengaruhi proses kolaborasi. Kondisi awal mencakup sejarah hubungan antaraktor, insentif untuk berpartisipasi, serta ketimpangan kekuasaan dan sumber daya. Desain kelembagaan berkaitan dengan aturan dasar, keterbukaan, dan inklusivitas proses, sedangkan kepemimpinan fasilitatif berperan dalam mempertemukan aktor, memfasilitasi dialog, dan mengatasi hambatan kolaborasi. Ketiga komponen tersebut memengaruhi proses kolaborasi yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil antara (*intermediate outcomes*). Kerangka ini relevan untuk penelitian Ngemplakrejo karena memungkinkan analisis terhadap kondisi yang membentuk kolaborasi, mekanisme kelembagaan, peran kepemimpinan, dan dinamika interaksi antaraktor secara terpadu.

Penelitian terdahulu telah membahas kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dari beragam sudut pandang. Kajian mengenai pengembangan UMKM, pemberdayaan kelompok nelayan, penguatan modal sosial, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi menunjukkan pentingnya keterlibatan aktor serta penyesuaian program dengan konteks lokal (Hendra et al., 2023; Purwanti, 2024; Titaley & Nurhaeny,2023). Sementara itu, penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan pengembangan usaha masyarakat juga memberikan perhatian pada pelaksanaan program dan hasil pemberdayaan (Fernanto et al., 2022). Meskipun memberikan landasan penting bagi kajian pengentasan kemiskinan pesisir, penelitian-penelitian tersebut perlu dibandingkan lebih lanjut berdasarkan unit analisis, metode, aktor yang dikaji, dan fokus proses kolaborasinya. Perbedaan antara penelitian yang menilai program pemberdayaan dan penelitian yang menelaah proses tata kelola menjadi penting karena keberadaan program tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana keputusan dibuat, peran dibagi, dan partisipasi dipertahankan.

Berdasarkan fokus tersebut, kesenjangan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami proses *collaborative governance* dalam pengentasan kemiskinan pada tingkat kelurahan pesisir, khususnya melalui hubungan antara kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa kajian tentang Ngemplakrejo seluruhnya menggunakan metode kuantitatif, tetapi memusatkan perhatian pada aspek proses kolaborasi yang menjadi fokus penelitian. Kebaruan analitisnya terletak pada penggunaan model (Ansell & Gash, 2008) untuk menelaah keterkaitan kondisi awal, aturan partisipasi, kepemimpinan, dan dinamika kolaborasi dalam konteks pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi kajian administrasi publik mengenai pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam konteks lokal, sekaligus memberikan masukan praktis bagi penguatan koordinasi dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan, berdasarkan kerangka (Ansell & Gash, 2008) ; serta (2) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kolaborasi tersebut. Penelitian ini berfokus pada kualitas proses kolaborasi, terutama dalam aspek koordinasi, pengaturan kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan keterlibatan aktor, bukan pada pengukuran dampak kausal terhadap penurunan angka kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola kolaboratif yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Studi kasus dipilih karena memungkinkan pengkajian mendalam terhadap praktik kolaborasi dalam konteks sosial dan kelembagaan tertentu. Penelitian berfokus pada proses kolaborasi dan faktor pendukung serta penghambatnya, bukan pada pengukuran dampak kausal program terhadap penurunan kemiskinan. Analisis menggunakan empat indikator (Ansell & Gash, 2008), yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Pengumpulan data dilaksanakan pada Juli–Agustus 2025.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu Lurah Ngemplakrejo, Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pasuruan, Ketua Paguyuban masyarakat pesisir, dan perwakilan masyarakat nelayan. Seluruh informan berjenis kelamin laki-laki. Pemilihan didasarkan pada relevansi posisi dan pengalaman informan terhadap proses kolaborasi yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui monografi Kelurahan Ngemplakrejo tahun 2025, data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) tahun 2024, serta dokumen dan literatur relevan yang tersedia. Perbedaan tahun dokumen diperhatikan dengan menempatkan setiap sumber sesuai periode datanya, sehingga perbedaan angka tidak langsung ditafsirkan sebagai perubahan kondisi tanpa pemeriksaan kesetaraan indikator dan cakupan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai kondisi awal, pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, serta dinamika kolaborasi. Observasi dan dokumentasi digunakan untuk memberikan konteks dan memeriksa kesesuaian informasi wawancara. Analisis data mengacu pada model (Miles et al., 2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Informasi dianalisis berdasarkan empat indikator (Ansell & Gash, 2008), disertai identifikasi faktor pendukung dan penghambat. Perbedaan keterangan antar-informan diperiksa dengan mempertimbangkan posisi, konteks, dan dukungan dari sumber lain.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari keempat informan serta memeriksanya terhadap hasil observasi dan dokumen yang tersedia. Persetujuan informan diperoleh secara lisan. Penelitian ini tidak melakukan penilaian saturasi data secara formal dan tidak melibatkan aktor tambahan di luar empat informan tersebut. Oleh karena itu, temuan diposisikan sebagai analisis kontekstual atas proses kolaborasi berdasarkan sumber data yang tersedia, bukan sebagai representasi menyeluruh dari seluruh aktor pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. Keterbatasan ini diperhitungkan dalam penarikan kesimpulan, terutama terkait keragaman partisipasi masyarakat dan keberlanjutan kolaborasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Ngemplakrejo merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang berbatasan langsung dengan Selat Madura dan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas perikanan laut yang menonjol di kota tersebut. Berdasarkan dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2025, jumlah penduduk Kelurahan Ngemplakrejo tercatat sebanyak 7.988 jiwa yang tersebar dalam 2.583 kepala keluarga (KK). Sementara itu, data tahun 2024 mencatat jumlah penduduk sebanyak 8.426 jiwa dengan 2.511 KK. Perbedaan angka tersebut menunjukkan perlunya memperhatikan periode dan sumber pendataan

ketika membaca perkembangan kependudukan. Adapun data penduduk usia produktif (15–56 tahun) tercatat sebanyak 6.541 jiwa pada kedua periode, sehingga angka tersebut perlu diverifikasi kembali untuk memastikan konsistensinya. Selain data kependudukan, Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) tahun 2024 mencatat 233 keluarga prasejahtera, 1.169 keluarga Sejahtera I, dan 307 keluarga Sejahtera II. Data tersebut memberikan gambaran awal mengenai kondisi kesejahteraan keluarga di Ngemplakrejo, meskipun distribusi kategori kesejahteraan secara keseluruhan masih perlu dikonfirmasi karena angka untuk kategori lainnya belum tercantum dalam data yang disajikan. Data kependudukan dan kesejahteraan keluarga tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Kependudukan dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Ngemplakrejo

Indikator	Tahun	Jumlah	Sumber
Jumlah penduduk	2024	8.426 jiwa	Dokumen data tahun 2024
Jumlah penduduk	2025	7.988 jiwa	Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2025
Jumlah kepala keluarga	2024	2.511 KK	Dokumen data tahun 2024
Jumlah kepala keluarga	2025	2.583 KK	Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2025
Penduduk usia produktif (15–56 tahun)	2024	6.541 jiwa*	Verifikasi dokumen sumber
Penduduk usia produktif (15–56 tahun)	2025	6.541 jiwa*	Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2025
Keluarga prasejahtera	2024	233 keluarga	Prodeskel Kelurahan Ngemplakrejo Tahun 2024
Keluarga Sejahtera I	2024	1.169 keluarga	Prodeskel Kelurahan Ngemplakrejo Tahun 2024
Keluarga Sejahtera II	2024	307 keluarga	Prodeskel Kelurahan Ngemplakrejo Tahun 2024

Sumber: *Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2025 serta Prodeskel Kelurahan Ngemplakrejo Tahun 2024. Nama resmi dokumen sumber data kependudukan tahun 2024 dan kesesuaian angka penduduk usia produktif perlu diverifikasi kembali. Data kategori kesejahteraan lainnya belum dicantumkan karena angkanya belum terkonfirmasi.*

Karakteristik sosial-ekonomi masyarakat Ngemplakrejo juga berkaitan erat dengan aktivitas perikanan tangkap yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir. (Handoko et al., 2022) menjelaskan bahwa kehidupan sosial-ekonomi masyarakat nelayan berkaitan dengan kondisi usaha perikanan yang dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Dalam konteks Ngemplakrejo, karakteristik tersebut relevan untuk dikaji karena ketergantungan rumah tangga pada sektor perikanan berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi ketika kegiatan melaut dan pendapatan tidak berlangsung secara stabil. Namun, kondisi mengenai fluktuasi pendapatan nelayan serta kenaikan biaya operasional, seperti bahan bakar dan perawatan perahu, perlu diperkuat dengan hasil wawancara, observasi, atau dokumentasi lokal agar dapat dinyatakan sebagai temuan empiris di Ngemplakrejo, bukan semata-mata mengacu pada kondisi masyarakat nelayan di wilayah lain.

Kondisi kependudukan, kesejahteraan keluarga, dan karakteristik ekonomi pesisir tersebut menjadi konteks penting dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kelurahan Ngemplakrejo. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga dengan bagaimana kebutuhan masyarakat diidentifikasi, program direncanakan, dan sumber daya dikoordinasikan oleh pemerintah serta unsur masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir perlu

dikaji dengan memperhatikan proses kolaborasi antarpemangku kepentingan, termasuk komunikasi, partisipasi masyarakat, pembagian peran, dan koordinasi dalam pelaksanaan program. Atas dasar itu, penelitian ini berfokus pada implementasi *collaborative governance* dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Ngemplakrejo, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses kolaborasi tersebut.

3.1 Kondisi Awal (Starting Conditions)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir menjadi salah satu konteks yang melatarbelakangi kebutuhan kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Ngemplakrejo. Ketergantungan pada sektor perikanan membuat pendapatan sebagian masyarakat rentan terhadap perubahan hasil tangkapan dan kondisi cuaca laut. Bapak Solikin, seorang nelayan, mengungkapkan:

> *"Kalau dibandingkan beberapa tahun lalu memang ada sedikit perubahan, tetapi kondisi ekonomi keluarga kami masih belum benar-benar stabil. Saya bekerja sebagai nelayan, jadi penghasilan sangat bergantung pada hasil tangkapan dan cuaca*." (Bapak Solikin, masyarakat nelayan, wawancara Juli 2025)

Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai kerentanan ekonomi yang dialami oleh informan nelayan, tetapi tidak dengan sendirinya mewakili seluruh masyarakat pesisir Ngemplakrejo. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, Dinas Sosial Kota Pasuruan menempatkan masyarakat pesisir sebagai salah satu kelompok sasaran yang perlu mendapat perhatian karena karakteristik mata pencahariannya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan serta menghubungkan kelompok sasaran dengan program yang tersedia. Kebutuhan koordinasi lintas aktor juga ditegaskan oleh Lurah Ngemplakrejo:

> *"Penanganan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kelurahan. Kami membutuhkan dukungan dari Dinas Sosial, OPD lain, perusahaan melalui program sosial, tokoh masyarakat, RT, RW, dan masyarakat sendiri*." (Abdul Wachied, S.E., Lurah Ngemplakrejo, wawancara Juli 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan memandang penanganan kemiskinan sebagai persoalan yang memerlukan keterlibatan sejumlah pihak, bukan sebagai tugas satu institusi saja. Dalam perspektif (Ansell & Gash, 2008), kondisi awal kolaborasi perlu dipahami dengan memperhatikan ketimpangan sumber daya, insentif untuk berpartisipasi, serta riwayat hubungan antaraktor. Pada kasus Ngemplakrejo, keterangan lurah memperlihatkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan dukungan lintas sektor, sedangkan wawancara dengan nelayan menggambarkan kerentanan ekonomi pada tingkat masyarakat. Kedua keterangan tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai alasan pentingnya kolaborasi: kebutuhan koordinasi dari sisi pemerintah dan kebutuhan penghidupan dari sisi masyarakat. Dari aspek sumber daya dan kekuasaan, pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, dan masyarakat memiliki posisi serta fungsi yang berbeda dalam proses pengentasan kemiskinan. Pemerintah dan perangkat daerah memiliki kewenangan administratif dalam pelaksanaan program sesuai tugas masing-masing, sedangkan masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai kebutuhan dan kondisi kehidupan mereka. Perbedaan posisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan setiap pihak dalam menentukan prioritas dan memengaruhi keputusan. Namun, tingkat ketimpangan tersebut perlu dinilai berdasarkan bukti mengenai akses informasi, keterlibatan dalam forum, dan kewenangan pengambilan keputusan, bukan hanya berdasarkan perbedaan kedudukan formal.

Insentif untuk berpartisipasi juga perlu dipahami dari kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor. Bagi pemerintah kelurahan, kolaborasi diperlukan untuk menghubungkan pelaksanaan program dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau sumber daya terkait. Sementara itu, bagi masyarakat, partisipasi dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebutuhan dan memperoleh informasi mengenai program pengentasan kemiskinan. Penjelasan ini merupakan interpretasi analitis atas konteks penelitian; bentuk insentif yang benar-benar dirasakan oleh masing-masing pihak perlu ditetapkan berdasarkan keterangan informan yang tersedia. Dengan demikian, kondisi awal kolaborasi di Ngemplakrejo memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan kapasitas pemerintah dengan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kondisi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa hubungan antaraktor sepenuhnya kondusif atau bahwa kepercayaan awal telah

terbentuk secara merata. Penilaian yang lebih kuat memerlukan bukti mengenai pengalaman kerja sama sebelumnya, penyelesaian perbedaan pendapat, dan kesempatan masyarakat untuk memengaruhi keputusan. Oleh sebab itu, kondisi awal kolaborasi lebih tepat dipahami sebagai situasi yang membuka kebutuhan sekaligus peluang bagi kerja sama lintas aktor, dengan tingkat kesetaraan dan kepercayaan yang masih perlu ditelaah melalui proses kolaborasi yang berlangsung.

3.1.1 Institutional Design

Desain kelembagaan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan collaborative governance untuk pengentasan kemiskinan di Kelurahan Ngemplakrejo. Dalam kerangka (Ansell & Gash, 2008), desain kelembagaan berkaitan dengan aturan dasar, kejelasan prosedur, keterbukaan partisipasi, dan pengaturan forum yang memungkinkan para pemangku kepentingan terlibat dalam proses kolaborasi. Pada konteks penelitian ini, desain kelembagaan perlu dipahami melalui dua aspek, yaitu keberadaan pedoman formal yang menjadi acuan pelaksanaan program dan pengaturan hubungan kerja antaraktor yang terlibat. Lurah Ngemplakrejo menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan mengacu pada ketentuan pemerintah dan koordinasi antarpihak:

> *"Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada peraturan pemerintah, petunjuk teknis dari instansi terkait, dan hasil koordinasi bersama... setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing."* (Abdul Wachied, S.E., Lurah Ngemplakrejo, wawancara 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan memandang regulasi, petunjuk teknis, dan koordinasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Namun, pernyataan ini belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh aspek desain kelembagaan telah diatur secara formal. Identifikasi mengenai nama dan nomor regulasi, petunjuk teknis, serta prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP) yang secara khusus digunakan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Ngemplakrejo masih perlu dilakukan. Di sisi lain, hubungan kerja antaraktor tidak seluruhnya didasarkan pada perjanjian tertulis. Ketua paguyuban menjelaskan:

> *"Untuk paguyuban kami tidak memiliki MoU secara khusus. Kerja sama lebih didasarkan pada koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan Dinas Sosial... Walaupun tidak ada perjanjian tertulis, setiap kegiatan tetap memiliki pembagian tugas yang jelas."* (Ibu Husnul, Ketua Paguyuban, wawancara 2025)

Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa koordinasi menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatur kerja sama antara paguyuban, pemerintah kelurahan, dan Dinas Sosial. Ketiadaan MoU khusus, sebagaimana disampaikan informan, tidak serta-merta menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berjalan. Akan tetapi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pembagian tanggung jawab, mekanisme penyelesaian perbedaan, dan kesinambungan kerja sama telah diatur secara formal. Apabila pengaturan tersebut hanya bergantung pada kesepakatan dalam koordinasi, kejelasan pelaksanaannya perlu diperiksa ketika terjadi pergantian personel, perbedaan kepentingan, atau perubahan prioritas program.

Pembagian peran antaraktor dapat menjadi dasar untuk memahami desain kelembagaan tersebut. Pemerintah kelurahan dapat dipahami sebagai penghubung antara program dan masyarakat, sedangkan Dinas Sosial menjalankan kewenangan sesuai tugasnya dalam penyelenggaraan program sosial. Paguyuban dan masyarakat berpotensi berperan dalam penyampaian informasi serta komunikasi mengenai kondisi warga. Meskipun demikian, pembagian peran tersebut perlu dikonfirmasi melalui keterangan masing-masing aktor dan dokumen pelaksanaan program agar tidak hanya didasarkan pada penjelasan satu pihak.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam penyampaian informasi atau pelaksanaan kegiatan tidak selalu berarti bahwa mereka memiliki pengaruh terhadap penentuan prioritas, kriteria penerima manfaat, atau alokasi anggaran. Data wawancara yang tersedia belum menunjukkan secara spesifik apakah usulan masyarakat pernah mengubah keputusan program atau apakah terdapat keputusan strategis yang tidak dapat mereka pengaruhi. Karena itu, klaim mengenai terbatasnya pengaruh masyarakat perlu didukung oleh contoh konkret dari informan masyarakat atau paguyuban serta dokumen yang relevan.

Dengan demikian, temuan awal mengenai desain kelembagaan menunjukkan adanya acuan formal dan mekanisme koordinasi antarpihak, tetapi tingkat pelembagaan hubungan kerja, kejelasan pertanggungjawaban, dan kedalaman partisipasi masyarakat masih memerlukan

pemeriksaan lebih lanjut. Analisis ini sejalan dengan (Ansell & Gash, 2008), yang menempatkan desain kelembagaan sebagai unsur penting dalam proses kolaborasi, terutama dalam menjamin aturan partisipasi dan kejelasan prosedur bagi aktor yang terlibat.

3.1.2 Facilitative Leadership

Kepemimpinan fasilitatif merupakan unsur penting dalam collaborative governance karena pemimpin tidak hanya menjalankan kewenangan administratif, tetapi juga memfasilitasi komunikasi, membangun kepercayaan, dan membantu aktor dengan kepentingan berbeda untuk bekerja sama. Dalam konteks Kelurahan Ngemplakrejo, peran ini dapat ditelaah melalui keterangan mengenai fungsi lurah dalam menghubungkan para pemangku kepentingan dan menjaga komunikasi selama pelaksanaan kegiatan. Lurah Ngemplakrejo menjelaskan perannya sebagai berikut:

> *"Sebagai lurah, saya berperan menghubungkan seluruh pihak yang terlibat agar komunikasi berjalan dengan baik. Kami memfasilitasi rapat koordinasi... Peran kami lebih kepada membangun sinergi agar setiap pihak dapat menjalankan fungsinya dengan baik."* (Abdul Wachied, S.E., Lurah Ngemplakrejo, wawancara 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa lurah memaknai kepemimpinannya sebagai upaya menghubungkan para aktor dan memfasilitasi koordinasi. Orientasi ini sejalan dengan konsep facilitative leadership dari (Ansell & Gash, 2008), yang menekankan pentingnya kemampuan pemimpin dalam mendorong partisipasi, memediasi perbedaan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kolaborasi berlangsung. Dari sisi Dinas Sosial, Erna selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin menyampaikan:

> *"Kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penyampaian informasi yang transparan, serta komitmen untuk menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing."* (Erna, Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kota Pasuruan, wawancara 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan komunikasi, transparansi informasi, dan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan dipandang sebagai unsur penting dalam membangun kepercayaan. Jika dihubungkan dengan penjelasan lurah, kedua pernyataan tersebut memperlihatkan kesamaan penekanan pada koordinasi dan komunikasi sebagai bagian dari pelaksanaan kolaborasi. Meskipun demikian, kesamaan pandangan mengenai pentingnya komunikasi belum cukup untuk membuktikan bahwa kepercayaan telah terbentuk secara merata di antara seluruh aktor. Untuk memperkuat analisis kepemimpinan fasilitatif, diperlukan bukti mengenai praktik yang benar-benar dilakukan, misalnya bagaimana lurah menengahi perbedaan pendapat, memastikan suara masyarakat didengar, merespons keluhan, atau menindaklanjuti usulan paguyuban. Bukti dari pihak paguyuban dan masyarakat juga diperlukan untuk mengetahui apakah fasilitasi tersebut dirasakan oleh aktor di luar pemerintah.

Saluran, frekuensi, dan aksesibilitas komunikasi juga perlu dijelaskan secara lebih konkret. Keterangan mengenai rapat koordinasi belum dengan sendirinya menjelaskan apakah komunikasi berlangsung secara rutin, melalui pertemuan langsung, pesan tertulis, atau saluran lainnya. Nama forum, jadwal pertemuan, pihak yang hadir, agenda pembahasan, dan hasil keputusan perlu diperiksa melalui notulen, undangan, dokumentasi, atau keterangan informan. Selain itu, keberadaan peran fasilitatif pada seorang pemimpin tidak otomatis membuktikan bahwa mekanisme kolaborasi bergantung pada individu tersebut. Kesimpulan bahwa mekanisme belum terlembagakan perlu didukung oleh pemeriksaan terhadap aturan, prosedur, pembagian kewenangan, serta praktik yang tetap berjalan ketika pemimpin atau personel berganti. Jika bukti tersebut belum tersedia, analisis yang lebih tepat adalah bahwa keberlanjutan mekanisme fasilitasi masih menjadi aspek yang perlu ditelaah, bukan bahwa kolaborasi pasti bergantung pada individu.

Berdasarkan data yang tersedia, kepemimpinan fasilitatif di Ngemplakrejo dapat diidentifikasi sebagai orientasi yang menekankan penghubungan aktor, koordinasi, dan komunikasi terbuka. Namun, sejauh mana orientasi tersebut diwujudkan dalam mediasi konflik, pemberdayaan aktor yang relatif lemah, dan jaminan partisipasi yang inklusif masih memerlukan bukti tambahan. Pembedaan ini penting agar analisis tidak berhenti pada pernyataan normatif pemimpin, tetapi juga menilai praktik fasilitasi dalam proses kolaborasi.

3.1.3 Collaborative Process

Proses kolaborasi merupakan inti collaborative governance karena memperlihatkan bagaimana para aktor berkomunikasi, membangun kepercayaan, mempertahankan komitmen, mengembangkan pemahaman bersama, dan menghasilkan capaian antara.

(Ansell & Gash, 2008) menekankan bahwa proses tersebut bersifat dinamis. Dialog tatap muka dapat membuka ruang pertukaran informasi, sedangkan kepercayaan dan komitmen dapat berkembang melalui interaksi yang berulang. Capaian antara atau intermediate outcomes kemudian dapat memperkuat kemauan aktor untuk melanjutkan kolaborasi. Dalam penelitian ini, keberadaan rapat koordinasi sebagaimana disebutkan oleh lurah menjadi petunjuk awal adanya ruang komunikasi antarpihak. Namun, keterangan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa forum berlangsung secara rutin atau bahwa seluruh aktor berpartisipasi di dalamnya. Untuk menjelaskan proses dialog secara lebih kuat, diperlukan informasi mengenai nama forum, waktu pelaksanaan, frekuensi pertemuan, aktor yang hadir, agenda, dan keputusan yang dihasilkan. Aspek pemahaman bersama dapat ditelaah melalui keterangan masyarakat nelayan. Bapak Solikin menjelaskan:

> "*Yang saya pahami tujuan program tersebut adalah membantu masyarakat yang kurang mampu agar kondisi ekonominya bisa menjadi lebih baik. Selain memberikan bantuan, pemerintah juga berusaha mendorong masyarakat supaya mempunyai kesempatan meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan."* (Bapak Solikin, Masyarakat Nelayan, wawancara 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memahami program pengentasan kemiskinan tidak hanya sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai upaya membuka kesempatan peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan. Keterangan ini merupakan bukti mengenai pemahaman seorang informan terhadap tujuan program. Akan tetapi, temuan tersebut belum dapat digeneralisasi menjadi kesimpulan bahwa seluruh aktor memiliki pemahaman yang sama. Untuk menilai pemahaman bersama, diperlukan perbandingan antara keterangan pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, paguyuban, dan masyarakat mengenai tujuan, sasaran, pembagian peran, serta hasil yang diharapkan dari program.

Kepercayaan dan komitmen juga perlu dianalisis berdasarkan praktik yang dapat ditelusuri. Pernyataan Dinas Sosial mengenai komunikasi terbuka dan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan menunjukkan pandangan informan mengenai unsur yang dianggap penting dalam membangun kepercayaan. Namun, untuk menunjukkan bahwa kepercayaan benar-benar terbentuk dalam proses kolaborasi, diperlukan contoh tindakan yang mencerminkan keterbukaan informasi, kesediaan berbagi data, tindak lanjut terhadap kesepakatan, atau penyelesaian perbedaan antaraktor. Tanpa bukti tersebut, analisis sebaiknya menempatkan komunikasi terbuka dan komitmen sebagai prinsip yang dinyatakan informan, bukan sebagai capaian yang telah terbukti secara menyeluruh.

Dari segi capaian antara, perbaikan koordinasi dan penataan data dapat menjadi indikator yang relevan apabila didukung oleh bukti empiris. Misalnya, perbaikan koordinasi dapat diperiksa melalui perbandingan mekanisme komunikasi sebelum dan sesudah kegiatan atau melalui dokumen yang menunjukkan tindak lanjut kesepakatan. Sementara itu, perbaikan data dapat ditelaah melalui catatan pembaruan, kesesuaian data antarlembaga, atau dokumentasi proses verifikasi penerima manfaat. Karena bukti perbandingan tersebut belum tersedia dalam data yang disampaikan, klaim bahwa koordinasi menjadi lebih baik dan data semakin tertata perlu diperlakukan sebagai temuan sementara yang memerlukan verifikasi.

Demikian pula, pernyataan bahwa kolaborasi belum mengubah pendapatan nelayan secara struktural membutuhkan data tersendiri. Penelitian yang berfokus pada proses kolaborasi tidak dengan sendirinya dapat memastikan perubahan atau ketiadaan perubahan pendapatan. Untuk membahas aspek tersebut, diperlukan keterangan yang lebih terarah mengenai perubahan pendapatan, ketergantungan pada musim, akses terhadap kegiatan pemberdayaan, atau pengalaman penerima manfaat. Jika data tersebut tidak tersedia, pembahasan lebih tepat diarahkan pada batas temuan penelitian, yaitu bahwa proses kolaborasi belum dapat digunakan sebagai bukti langsung mengenai perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, data yang tersedia memberikan gambaran awal mengenai orientasi tujuan program dan pentingnya koordinasi dalam proses kolaborasi. Namun, penilaian atas kualitas proses tersebut perlu membedakan keberadaan forum, pengalaman komunikasi, pemahaman masing-masing aktor, pembentukan kepercayaan, serta capaian antara. Pembedaan ini mencegah satu pernyataan informan digunakan untuk mewakili seluruh aktor atau untuk membuktikan hasil kolaborasi yang belum didukung oleh data pembanding.

3.1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi

Pelaksanaan collaborative governance dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung maupun menghambat keterlibatan para aktor. Dalam kerangka (Ansell & Gash, 2008), faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan dinamika proses kolaborasi. Oleh karena itu, faktor pendukung dan penghambat perlu dianalisis berdasarkan bukti lapangan, kemudian dihubungkan dengan dimensi model yang relevan.

Tabel berikut merangkum faktor yang telah disebutkan dalam draf penelitian, sekaligus menunjukkan bukti yang perlu diperiksa sebelum faktor tersebut dinyatakan sebagai temuan yang terkonfirmasi.

Tabel 2. Kerangka Penelitian

Faktor	Hubungan dengan model Ansell dan Gash	Bukti yang diperlukan	Batas klaim
Komitmen bersama	Proses kolaborasi: komitmen terhadap proses	Keterangan lintas aktor tentang pelaksanaan tugas, tindak lanjut kesepakatan, dan keberlanjutan keterlibatan	Jangan menyimpulkan semua aktor berkomitmen jika hanya satu atau dua informan yang menyatakannya
Komunikasi dan koordinasi	Kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi	Dokumen atau keterangan tentang forum, saluran komunikasi, frekuensi, agenda, serta tindak lanjut	Keberadaan komunikasi belum otomatis membuktikan koordinasi efektif
Dukungan regulasi	Desain kelembagaan	Nama dan nomor regulasi, petunjuk teknis, SOP, serta bukti penggunaannya	Pernyataan umum tentang aturan belum membuktikan kejelasan seluruh prosedur
Partisipasi masyarakat	Desain kelembagaan dan proses kolaborasi	Contoh keterlibatan masyarakat dalam penyampaian informasi, penentuan agenda, usulan, dan keputusan	Kehadiran atau pelaksanaan tugas belum otomatis berarti masyarakat memengaruhi keputusan
Pemutakhiran data penerima manfaat	Kondisi awal dan desain kelembagaan	Dokumen data, tanggal pembaruan, mekanisme verifikasi, serta keterangan aktor terkait	Jangan menyebut data tidak akurat atau tidak mutakhir tanpa bukti pembanding
Keterbatasan anggaran	Kondisi awal dan desain kelembagaan	Dokumen anggaran, informasi alokasi dan realisasi, atau keterangan spesifik mengenai kegiatan yang terkendala	Jangan menyimpulkan anggaran menjadi penghambat utama tanpa bukti tentang dampaknya
Keterbatasan waktu nelayan	Kondisi awal dan proses kolaborasi	Keterangan nelayan mengenai jadwal melaut dan contoh ketidakhadiran atau kesulitan mengikuti kegiatan	Jangan menggeneralisasi kondisi seluruh nelayan dari satu informan
Pemahaman masyarakat mengenai persyaratan program	Desain kelembagaan dan proses kolaborasi	Contoh kesalahpahaman, kebutuhan penjelasan ulang, atau kasus administrasi yang tertunda	Jangan menyimpulkan pemahaman masyarakat rendah tanpa bukti spesifik

Berdasarkan kerangka tersebut, komitmen, komunikasi, dukungan regulasi, dan partisipasi masyarakat dapat diposisikan sebagai faktor pendukung yang perlu diuji melalui bukti

lapangan. Demikian pula, pembaruan data, keterbatasan anggaran, waktu kerja nelayan, dan pemahaman mengenai persyaratan program dapat diposisikan sebagai dugaan faktor penghambat yang memerlukan konfirmasi. Penempatan ini penting karena daftar faktor dalam draf belum dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap faktor benar-benar muncul dan berdampak pada pelaksanaan kolaborasi di Ngemplakrejo.

Analisis faktor penghambat juga perlu menjelaskan bagaimana hambatan memengaruhi proses kolaborasi. Sebagai contoh, apabila pemutakhiran data terbukti terkendala, penelitian perlu menjelaskan tahap yang terdampak: apakah proses identifikasi penerima manfaat, pertukaran informasi antarlembaga, atau tindak lanjut program. Jika keterbatasan waktu nelayan terbukti menghambat keikutsertaan, perlu dijelaskan apakah kendala tersebut memengaruhi kehadiran dalam forum, penerimaan informasi, atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Tanpa hubungan empiris semacam ini, faktor-faktor tersebut hanya menjadi daftar masalah umum dan belum menjelaskan dinamika kolaborasi.

Literatur terdahulu, termasuk (Hendra et al., 2023), (Puspitasari, 2024), (Purwanti, 2024), serta (Titaley & Nurhaeny, 2023), dapat digunakan untuk membandingkan temuan setelah kesesuaian sumber, konteks, dan hasil penelitian masing-masing diverifikasi. Literatur tidak seharusnya menggantikan bukti lokal. Jika penelitian terdahulu menemukan kendala koordinasi atau anggaran di lokasi lain, temuan tersebut dapat membantu menjelaskan kemungkinan mekanisme hambatan, tetapi tidak membuktikan bahwa hambatan yang sama terjadi di Ngemplakrejo.

Dengan demikian, pembahasan faktor pendukung dan penghambat perlu menghubungkan tiga unsur: bukti empiris lokal, dampak faktor terhadap proses kolaborasi, dan relevansinya dengan model Ansell dan Gash. Pendekatan ini menghasilkan analisis yang lebih kuat dibandingkan sekadar menyebutkan faktor yang dianggap mendukung atau menghambat program.

3.2 Keterkaitan Antardimensi dan Implikasi terhadap Kualitas Kolaborasi

Temuan mengenai desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, serta faktor pendukung dan penghambat perlu dibaca sebagai dimensi yang saling berhubungan. Dalam model (Ansell & Gash, 2008), kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif memengaruhi proses kolaborasi. Hubungan tersebut tidak harus dipahami sebagai urutan linear yang selalu bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya, sebab pengalaman dalam proses kolaborasi juga dapat memengaruhi kepercayaan, komitmen, dan kesediaan aktor untuk melanjutkan kerja sama.

Dalam konteks Ngemplakrejo, keterangan lurah mengenai koordinasi dan keterangan Ketua Paguyuban mengenai kerja sama tanpa MoU khusus menunjukkan adanya praktik koordinasi yang menjadi bagian dari hubungan kerja antarpihak. Sementara itu, pernyataan Dinas Sosial mengenai komunikasi terbuka dan komitmen menjalankan tugas sesuai kewenangan memperlihatkan pentingnya komunikasi dalam pandangan aktor pemerintah. Keterangan masyarakat nelayan tentang tujuan bantuan dan pemberdayaan memberikan gambaran mengenai cara seorang informan memahami program tersebut. Jika dibaca bersama, data ini menunjukkan bahwa koordinasi, pembagian peran, dan pemahaman terhadap tujuan program merupakan aspek yang relevan untuk menelaah kualitas kolaborasi.

Namun, keterkaitan antardimensi tersebut tidak boleh langsung diterjemahkan menjadi hubungan sebab-akibat. Data yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa desain kelembagaan yang ada telah menghasilkan kepercayaan, bahwa kepemimpinan fasilitatif telah menjamin partisipasi inklusif, atau bahwa dialog antarpihak telah meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Hubungan tersebut perlu dibuktikan melalui contoh interaksi, proses pengambilan keputusan, tindak lanjut kesepakatan, dan perubahan yang dapat ditelusuri.

Ketiadaan MoU khusus, misalnya, tidak otomatis berarti koordinasi tidak berjalan. Akan tetapi, apabila mekanisme koordinasi tidak disertai prosedur yang terdokumentasi, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan tanggung jawab dan keberlanjutan kerja sama. Demikian pula, kepemimpinan yang menekankan fasilitasi dapat membuka ruang komunikasi, tetapi kualitasnya perlu dinilai berdasarkan apakah aktor masyarakat benar-benar dapat menyampaikan aspirasi dan apakah aspirasi tersebut dipertimbangkan dalam keputusan. Dengan demikian, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif perlu dianalisis berdasarkan hubungan keduanya dengan pengalaman nyata para aktor, bukan hanya berdasarkan keberadaan aturan atau pernyataan normatif.

Implikasi utama dari analisis ini adalah bahwa penilaian terhadap kolaborasi di Ngemplakrejo sebaiknya difokuskan pada kualitas proses dan pelaksanaan kolaborasi, bukan langsung pada efektivitas pengentasan kemiskinan. Penilaian efektivitas membutuhkan kriteria dan indikator yang jelas, misalnya perubahan ketepatan sasaran bantuan, peningkatan akses terhadap program pemberdayaan, atau perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat dalam periode tertentu. Apabila penelitian belum mengukur indikator tersebut, klaim mengenai efektivitas atau keberhasilan pengentasan kemiskinan perlu dibatasi.

Berdasarkan data yang tersedia, penelitian ini dapat membahas bagaimana aktor memaknai pembagian peran, koordinasi, komunikasi, dan tujuan program. Penelitian juga dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperiksa lebih lanjut, seperti pelembagaan kerja sama, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembentukan kepercayaan, dan bukti capaian antara. Batas ini tidak mengurangi nilai penelitian, tetapi justru memperjelas kontribusi empirisnya: menjelaskan pelaksanaan kolaborasi pada tingkat lokal sekaligus menunjukkan aspek-aspek yang belum dapat dipastikan berdasarkan data yang tersedia.

IV. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir Kelurahan Ngemplakrejo, Kota Pasuruan, telah berlangsung melalui koordinasi antara pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, paguyuban, dan masyarakat. Berdasarkan kerangka collaborative governance (Ansell & Gash, 2008). temuan penelitian dapat dipahami melalui keterkaitan kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Pada aspek desain kelembagaan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada ketentuan pemerintah dan koordinasi antarpihak, meskipun kerja sama paguyuban dengan pemerintah, menurut keterangan informan, tidak didasarkan pada MoU khusus. Pada aspek kepemimpinan, lurah memosisikan diri sebagai penghubung dan fasilitator komunikasi, sedangkan Dinas Sosial menekankan keterbukaan informasi dan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan. Sementara itu, keterangan masyarakat nelayan menunjukkan pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan, tetapi juga dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya dasar koordinasi dan orientasi kerja sama antarpihak, tetapi belum cukup untuk memastikan bahwa partisipasi telah berlangsung secara inklusif, kepercayaan telah terbentuk secara merata, atau mekanisme kolaborasi telah terlembaga secara berkelanjutan. Demikian pula, perbaikan koordinasi dan ketertiban pendataan sebagai capaian antara masih perlu didukung oleh bukti pembanding yang lebih konkret. Oleh karena itu, penelitian ini belum dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi telah meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan atau mengatasi persoalan kemiskinan struktural masyarakat nelayan. Fokus temuan lebih tepat ditempatkan pada pelaksanaan proses kolaborasi dan aspek tata kelola yang masih perlu diperkuat.

Faktor pendukung dan penghambat juga perlu dipahami secara proporsional. Komunikasi, koordinasi, pembagian peran, dan komitmen menjalankan kewenangan merupakan aspek yang relevan dalam mendukung kolaborasi, tetapi tingkat kontribusinya perlu ditelusuri melalui bukti lintas aktor. Adapun keterbatasan anggaran, pemutakhiran data, kondisi ekonomi pesisir, dan hambatan partisipasi perlu dikonfirmasi melalui keterangan informan serta dokumentasi yang relevan sebelum dinyatakan sebagai faktor penghambat yang telah terbukti. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai dinamika kolaborasi dalam satu kasus lokal, sekaligus mengidentifikasi aspek kelembagaan dan proses yang memerlukan penguatan.

Kesimpulan ini memiliki keterbatasan karena penelitian dilakukan pada satu lokasi kasus dan melibatkan empat informan yang dipilih secara purposif. Keterangan yang diperoleh belum mencakup seluruh kelompok pemangku kepentingan, seperti organisasi perangkat daerah lainnya, kelompok perempuan nelayan, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok penerima manfaat. Selain itu, penelitian belum mengukur perubahan pendapatan rumah tangga, ketepatan sasaran bantuan secara kuantitatif, atau dampak program terhadap tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, temuan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh pengalaman masyarakat Ngemplakrejo ataupun digeneralisasi ke seluruh wilayah pesisir, melainkan untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan.

Pernyataan Penulis

Kontribusi Penulis

Penulis bertanggung jawab atas keseluruhan proses penelitian dan penyusunan artikel, meliputi konseptualisasi penelitian, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis dan interpretasi data, penyusunan draf naskah, serta revisi dan penyempurnaan artikel. Penulis juga bertanggung jawab atas validitas argumentasi, interpretasi temuan, dan persetujuan terhadap versi akhir naskah.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik finansial, komersial, maupun personal, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, interpretasi temuan, dan penyusunan artikel ini.

Penggunaan Kecerdasan Buatan

Penulis mengakui penggunaan ChatGPT (OpenAI) dan Claude (Anthropic) sebagai alat bantu dalam proses penyempurnaan naskah, khususnya untuk perbaikan bahasa akademik, penataan struktur penulisan, peningkatan kejelasan argumentasi, dan penyuntingan teks. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh alat bantu AI telah ditinjau, dievaluasi, dan disunting oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan data, interpretasi hasil penelitian, argumentasi ilmiah, orisinalitas, dan seluruh isi akhir artikel.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri tanpa memperoleh dukungan pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, institusi swasta, maupun organisasi lainnya.

Poin-Poin Utama Penelitian

1. Keterangan lintas informan menunjukkan adanya pembagian tugas di antara aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif di Ngemplakrejo.
2. Pembagian peran antarpemangku kepentingan menjadi salah satu aspek penting dalam memahami praktik penyelenggaraan collaborative governance di tingkat lokal.

Ketersediaan Data dan Bahan

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang relevan dengan praktik collaborative governance di Ngemplakrejo. Data tidak tersedia secara terbuka karena mempertimbangkan kerahasiaan informan dan konteks penelitian. Permohonan akses terhadap data yang dapat dibagikan dapat diajukan kepada penulis korespondensi dengan memperhatikan ketentuan etika penelitian.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Prianto, S.Sos., M.PA. selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya selama proses penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada Program Studi Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan atas dukungan akademik yang diberikan. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada Lurah Kelurahan Ngemplakrejo, Dinas Sosial Kota Pasuruan, Ketua Paguyuban masyarakat pesisir, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(1), 194–214. https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659

Handoko, D. K. D., Fitriyana, F., & Susilo, H. (2022). Karakteristik Sosial Ekonomi Hubungan Patron Klien Pada Masyarakat Nelayan Purse Seine Di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Jurnal Perikanan Unram, 12(3), 408–417. https://doi.org/10.29303/jp.v12i3.347

Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 12(1), 72–80. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16880

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.

Purwanti, T. (2024). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kasus Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur). Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 11(1). https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6146

Puspitasari, D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terkait Perekonomian di Desa Mororejo Kabupaten Kendal dengan Perspektif Modal Sosial. SOSEARCH : Social Science Educational Research, 4(2), 22–29. https://doi.org/10.26740/sosearch.v4n2.p22-29

Titaley, S., & Nurhaeny, A. (2023). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Kelompok Nelayan Dalam Pengembangan Desa Pesisir (Studi Kasus : Desa Larike). Journal Teknik Mesin, Elektro, Informatika, Kelautan Dan Sains, 3(2), 79–86. https://doi.org/10.30598/metiks.2023.3.2.79-86

Copyright© 2026. This is an open access article un-der the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/li-censes/by-nc-sa/4.0/)